

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) - 2018



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BERAU**

JALAN DR. MURJANI 1 NOMOR 96 TANJUNG REDEB – BERAU 77311



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik, tepat sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan LAKIP ini berpedoman pada PEPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau,

Apridoh Piarso, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630402 199203 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. KEPEGAWAIAN	7
E. SARANA DAN PRASARANA	8
F. ADMINISTRASI	9
G. ASPEK KEUANGAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI DAN MISI.....	11
B. TUJUAN DAN SASARAN	12
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	13
D. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. EVALUASI KINERJA	21
B. PENJELASAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	43



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik, tepat sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan LAKIP ini berpedoman pada PEPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau,

Apridoh Piarso, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630402 199203 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. KEPEGAWAIAN	7
E. SARANA DAN PRASARANA	8
F. ADMINISTRASI	9
G. ASPEK KEUANGAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI DAN MISI.....	11
B. TUJUAN DAN SASARAN	12
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	13
D. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. EVALUASI KINERJA	20
B. PENJELASAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	46
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
KESIMPULAN.....	47

**REALISASI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018**

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DPA 2016 (Rp)		REALISASI 2016			PAGU DPA 2017 (Rp)		REALISASI 2017		
		AWAL	DPPA	KEUANGAN		FISIK (BOBOT TERTIMBANG)%	AWAL	DPPA	KEUANGAN		FISIK (BOBOT TERTIMBANG)%
				(Rp.)	%				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NON PROGRAM	4.844.500.000	4.507.700.000	4.175.288.231	92,63	44,23	4.304.050.000	4.607.650.000	4.219.154.979	91,57	59,89
B	Belanja Langsung	5.193.332.700	4.931.663.222	4.748.677.876	96,29	50,31	2.046.953.000	2.437.502.800	2.315.231.117	94,98	32,86
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.134.705.000	1.440.700.526	1.402.048.500	97,32	14,85	994.177.750	1.209.977.550	1.141.399.000	94,33	16,20
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	0,04	2.500.000	8.050.000	8.048.450	99,98	0,11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	195.000.000	174.000.000	160.397.350	92,18	1,70	169.000.000	230.065.800	219.689.300	95,49	3,12
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	100.000.000	106.986.754	100.302.000	93,75	1,06	107.500.000	133.020.000	95.265.700	71,62	1,35
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	124.955.000	188.340.000	188.340.000	100	2	107.288.000	109.988.000	109.104.000	99,20	1,55
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000	9.500.000	9.461.900	99,60	0,10	7.500.000	9.375.000	9.373.100	99,98	0,13
	Penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja	10.000.000	13.000.000	12.610.000	97	0,13	5.000.000	6.500.000	6.500.000	100	0,09
	Penyediaan alat tulis kantor	20.957.200	24.107.200	23.718.600	98,39	0,25	15.000.000	22.000.000	22.000.000	100	0,31
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	12.480.000	12.457.100	99,82	0,13	10.000.000	27.300.000	15.319.200	56,,11	0,22
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	10.000.000	18.000.000	17.156.500	95,31	0,18	5.000.000	7.500.000	7.423.500	98,98	0,11
	Bangunan kantor										
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	15.420.000	14.810.000	96,04	0,16	5.000.000	7.592.000	7.547.000	99,41	0,11

	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	20.000.000	19.989,450	99,95	0,21	10.000.000	17.000.000	16.781.200	98,71	0,24
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	255.609.900	373.983.672	371.989.500	99,47	3,94	170.869.750	220.869.750	220.100.000	99,65	3,12
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	20.000.000	40.000.000	38.995.000	97,49	0,41	30.000.000	30.000.000	29.970.000	99,90	0,43
	Penyediaan Jasa Administrasi/Tehnis Perkantoran	165.082.900	279.382.900	271.362.100	97,13	2,87	349.520.000	380.717.000	374.277.550	98,31	5,31
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	182.100.000	162.000.000	156.959.000	96,89	1,66	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.000.000	90.000.000	79.559.200	88,40	0,84	19.000.000	23.750.000	13.310.000	56,04	0,19
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	90.000.000	79.559.200	88,40	0,84	19.000.000	23.750.000	13.310.000	56,04	0,19
	Program Peningkatan Pengemabnagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	78.585.000	78.585.000	78.581.800	100	0,83	17.998.750	47.998.750	46.748.750	97,40	0,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	48.585.000	48.585.000	48.585.000	100	0,51	17.998.750	47.998.750	46.748.750	97,40	0,66
	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	30.000.000	30.000.000	29.996.800	99,99	0,32	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.499.740.000	1.379.353.220	1.347.155.120	97,67	14,27	205.827.500	255.827.500	252.501.000	98,70	3,58
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	1.499.740.000	1.379.353.220	1.347.155.120	97,67	14,27	205.827.500	255.827.500	252.501.000	98,70	3,58
	Program Peningkatan	116.814.000	115.014.000	104.717.050	91,05	1,11	-	-	-	-	-

Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	116.814.000	115.014.000	104.717.050	91,05	1,11	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	301.505.000	124.947.500	123.046.800	98,48	1,30	63.386.000	153.386.000	130.076.200	84,80	1,85
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	145.767.000	110.061.500	108.970.800	99,01	1,15	63.386.000	103.386.000	98.626.200	95,40	1,40
Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	155.738.000	14.886.000	14.076.000	94,56	0,15	-	50.000.000	31.450.000	62,29	0,45
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	1.813.146.200	1.572.494.180	1.483.495.610	94,34	15,72	746.563.000	746.563.000	731.196.167	97,94	10,23
Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lemabaga Ketenagakerjaan dan saranaa HI	224.604.000	174.907.900	174.907.900	100	1,85	287.106.000	287.106.000	276.327.100	96,25	3,92
Penyuluhan dan Penyelesaian Persilihan Hubungan Industrial	264.620.000	190.619.320	185.849.270	97,50	1,97	191.001.000	191.001.000	188.516.080	98,70	2,68
Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan Syarat-syarat Sosialisasi sebagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	420.782.400	379.381.400	305.802.500	80,61	3,24	286.456.000	286.456.000	266.352.987	99,22	3,78
Peningkatan pengawasan ,perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	206.549.200	182.580.200	175.295.200	96,01	1,86	-	-	-	-	-
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan	203.314.800	165.903.120	163.862.980	98,77	1,74	-	-	-	-	-
	239.270.000	258.042.440	256.807.960	99,52	2,72	-	-	-	-	-

penegakan hukum terhadap norma kerja										
Peningkatan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dan pencaanangan bulan K3	254.005.800	221.059.800	220.969.800	99,96	2,34	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	223.837.500	130.568.796	130.073.796	99,62	1,38	-	-	-	-	-
Penertiban tanah lahan fasum dan fasos wilayah eks pemukiman transmigrasi	73.264.000	59.026.920	58.636.920	99,34	0,62	-	-	-	-	-
Pembinaan kelompok usaha bersama (KUB) dikawasan ekspemukiman transmigrasi	150.573.500	71.541.876	71.436.876	99,85	0,76	-	-	-	-	-
JUMLAH	10.037.832.700	9.439.363.222	8.923.966.107		94,54	6.351.003.000	7.045.152.800	6.534.386.096		92,75



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 55 ayat 5 mengatakan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, di dalam Pasal 10 Ayat (1) mengatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai Lembaga Teknis yang membantu Kepala Daerah, wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan anggaran.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:



- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 114);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



- 11) Permendagri Nomor: 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor: 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
- 13) Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Rincian tugas pokok, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

1. Pembentukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau merupakan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau.

Dasar Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 56 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.



2. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendlikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lain.

3. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau terdiri dari : 1 (satu) Kepala Dinas dan Sekretaris, 4 (empat) Kepala



Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Perluasan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan
 - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi
 - c. Seksi Pengembangan Produktifitas
5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja
6. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - a. Seksi Pemukiman dan Penempatan
 - b. Seksi Pembinaan sosial Ekonomi
 - c. Seksi Pembinaan sosial Budaya



STUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU TAHUN 2018





D. KEPEGAWAIAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 49 orang terdiri dari PNS sebanyak 36 Orang dan Non-PNS sebanyak 12 orang (update thn 2018), dengan rincian :

- Pejabat struktural = 21 Orang
- Staf Pelaksana = 16 Orang
- Pegawai Tidak Tetap (PTT) = 12 Orang
- Pegawai Harian Lepas Tenaga Pembantu = 0 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya dari 49 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2018) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	0 Orang
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0 Orang
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	11 Orang
4	Deploma III	3 Orang
5	Sarjana (S.1)	22 Orang
6	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang
	Jumlah	49 Orang

Berdasarkan kualifikasi jenis kelaminnya dari 48 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2018) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	Eselon			
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	3	0	3
3.	Eselon IV	13	4	17
	Jumlah	16	4	21
	Pejabat Fungsional			
4		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Staf Pelaksana			



5	Staf	6	10	16
	Jumlah	6	10	16
	PTT			
6	Honoror	8	4	12
	Jumlah	8	4	12
	THL-TB & PMT			
7	THL-TB			
	Jumlah			
Jumlah Total		30	18	49

Berdasarkan Kepangkatan dan golongannya dari 48 orang yang berstatus PNS dapat dirinci sebagai berikut :

No	Pangkat / Golongan Ruang (Update Thn 2017)	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Pembina Utama Muda / IV-C	1
2	Pembina Tingkat I / IV-B	2
3	Pembina / IV-A	2
4	Penata Tk I / III-D	9
5	Penata / III-C	10
6	Penata Muda Tk. I / III-B	6
7	Penata Muda / III-A	1
8	Pengatur Tk. I / II-D	
9	Pengatur / II-C	2
10	Pengatur Muda Tk. I / II-B	3
11	Pengatur Muda / II-A	
12	Juru/ I-C	
Jumlah		49 orang

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Berau dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Nama barang	Jumlah	Kondisi Lengkap/Kurang /Cukup	Ket.
1.	Kantor Badan	2 Unit	2 Cukup Baik	Layak
2.	Komputer PC/ Laptop/Notebook	14 Unit	Kurang 3 Unit Baik 11 unit	Perlu penambahan Pengadaan
3.	Kend.Roda 4	2 Unit	Lengkap/Cukup	Perlu penambahan Pengadaan
5.	Kend. Roda 2	38 Unit	Kurang layak 10 unit Baik 28 unit	Perlu penambahan Pengadaan
6.	Perlengkapan Kantor	10 Paket	Baik	Layak
7.	Alat Vidio Visual	2 Paket	Baik	Layak

F. ADMINISTRASI PEMERINTAH

Secara administrasi Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 kecamatan. Adapun ketiga belas kecamatan tersebut adalah Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Biduk-Biduk, Talisayan, Tubaan, Batu Putih, Lempake, Pulau Derawan, Maratua, Segah, Kelay dan Teluk Bayur. Dari kecamatan tersebut di atas terbentuk dari 10 kelurahan dan 100 kampung. Sedangkan jumlah rukun tetangga di Kabupaten Berau adalah 671 RT.

No.	Kecamatan	Kampung/ Kelurahan
1.	Kelay	14
2.	Talisayan	10
3.	Tabalar	6
4.	Biduk-Biduk	6
5.	Pulau Derawan	5
6.	Maratua	4
7.	Sambaliung	14
8.	Tanjung Redeb	6



9.	Gunung Tabur	11
10.	Segah	13
11.	Teluk Bayur	6
12.	Batu Putih	7
13.	Biatan	8
Jumlah		110

G. ASPEK KEUANGAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau sebesar **RP. 2.628.862.000,-** (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) anggaran ini adalah untuk mengakomodir beberapa program kegiatan seperti berikut:

NO	Program	Keuangan (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.415.907.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.955.000
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	388.000.000
5.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	285.000.000
6.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	345.000.000
7.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	134.234.000
8.	Program transmigrasi Regional	40.766.000



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Dalam rangka menentukan arah yang akan dicapai dimasa mendatang, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau mempunyai Visi sebagai berikut :

"Mengembangkan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian secara menyeluruh, Produktif, Kompetitif, dan Sejahtera serta terpadu yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Berau sebagai Daerah Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata"

2. Rumusan Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan ***misi*** yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu tertentu. ***Misi*** tersebut merupakan kegiatan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang meliputi Pencari Kerja, Perusahaan, Wirausahaan dan Transmigran. Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Pencari Kerja dan Informasi Pasar Kerja serta Kesempatan Kerja;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja serta meningkatkan Fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan Penyiapan Pemukiman, Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan.



B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas baik manajemen maupun administrasi yang akuntabel dalam fasilitas dan pelayanan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pembangunan sinergisitas kebijakan, rencana program, pelaksanaan dan pengendalian antar unit kerja dan dengan Satuan Kerja/lembaga/sector-sektor terkait untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- c. Peningkatan pelayanan, sarana informasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang transparan, cepat, akurat, dan akuntabel untuk menyediakan informasi dan pelayanan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja.
- d. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meningkatkan kualitas dan terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan transmigran.
- e. Penciptaan ketenangan bekerja dan berusaha dan terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*Independent*), professional dan seragam di Kalimantan Timur.
- f. Pelaksanaan pengembangan wilayah transmigrasi, transmigrasi regional dan transmigrasi local untuk menciptakan ketahanan nasional (Pangan dan Keamanan) dan menciptakan keunggulan potensi local guna meningkatkan daya saing local serta kesejahteraan masyarakat dan transmigran.

2. Sasaran

- a. Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas baik manajemen maupun administrasi yang akuntabel dalam fasilitas dan pelayanan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



- b. Terciptanya sinergisitas kebijakan, rencana program, pelaksanaan dan pengendalian antar unit kerja dan dengan Satuan Kerja/lembaga/sector-sektor terkait untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- c. Tersedianya sarana informasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang transparan, cepat, akurat, dan akuntabel untuk menyediakan informasi kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja.
- d. Tersedianya kualitas dan produktivitas SDM dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meningkatkan kualitas dan terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi.
- e. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha serta trwujudnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri(*Independent*), professional dan seragam di Kalimantan Timur.
- f. Terwujudnya pelaksanaan pengembangan wilayah transmigrasi, transmigrasi regional dan transmigrasi local untuk menciptakan ketahanan nasional (Pangan dan Keamanan) dan menciptakan keunggulan potensi lokal guna meningkatkan daya saing lokal serta kesejahteraan masyarakat dan transmigran.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

a. Ketenagakerjaan

Strategi dibidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
2. Peningkatan kinerja industri agar dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja.
3. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.
4. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan.



5. Fasilitasi dan pengembangan lembaga kursus/pelatihan tenaga kerja.
 6. Peningkatan peran serikat pekerja dalam fasilitasi perselisihan hubungan industrial.
 7. Peningkatan keselamatan kerja melalui penyediaan sarana prasarana K3.
- b. Ketransmigrasian
- Strategi dibidang ketransmigrasian adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan MOU dengan daerah tujuan transmigrasi lainnya.
 2. Peningkatan kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi dalam hal penyediaan sarana prasarana di lokasi transmigrasi.

2. Kebijakan

- a. Ketenagakerjaan
- kebijakan dibidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Menurunkan jumlah pengangguran melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan kegiatan prioritas kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
 2. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja melalui peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja.
 3. Menurunkan jumlah perselisihan hubungan industrial dan kecelakaan kerja.
- b. Ketransmigrasian
- kebijakan dibidang ketransmigrasian adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam transmigran.
 2. Meningkatkan MOU lokasi calon Transmigran.



D. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018

Dalam upaya tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan, serta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2018 menetapkan 8 (delapan) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.415.907.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	217.339.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas-/operasional	124.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	102.624.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.920.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	105.220.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.690.000
	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	269.576.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	78.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	373.038.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.955.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4.955.000
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	388.000.000
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	388.000.000
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	285.000.000
	Penyusun Informasi Bursa tenaga kerja	90.000.000
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	195.000.000
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	345.000.000



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

		Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	100.000.000
		Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	175.000.000
		Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	70.000.000
7	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		134.234.000
		Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana social dan ekonomi di kawasan transmigrasi	134.234.000
8	Program Transmigrasi Regional		40.766.000
		Penyuluhan transmigrasi regional	40.766.000
Jumlah			2.628.862.000

Adapun Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif dan efisien	Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	4 Bidang dan Sekretariat
2.	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung Kantor
3.	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang dapat mengamalkan PP No. 53 dengan baik	Persentase tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	100 %
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program, peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Disnakertrans - Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran dan akuntabilitas kinerja - Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu - Peningkatan dalam nilai LkjIP 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>60 buku</p>
5.	Terwujudnya tenaga kerja siap pakai dan siap kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja	40 orang
6.	Terwujudnya tingkat penyerapan Tenaga Kerja kerja pada perusahaan dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari Kerja dalam wilayah Kabupaten Berau - Pelaku Usaha Mandiri 	<p>Perusahaan di 13 Kecamatan</p> <p>60 orang</p>



	terwujudnya masyarakat yang mandiri		
7.	Terwujudnya ketenangan kerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan • Jumlah perusahaan yang melaksanakan memiliki peraturan pemerintah • Jumlah perusahaan yang melaksanakan perjanjian kerja bersama • Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan • Lembaga Kerjasama Bipartit • Upah Minimal sama dengan UMK 	30 perusahaan
8.	Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang Mandiri	Persentase KK transmigrasi yang mandiri	3 Kecamatan

2. Dukungan Anggaran Rencana Pembangunan Tahun 2019

Perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2019, telah disusun dengan melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, Forum Koordinasi Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Musyawarah Pembangunan Kabupaten. Berdasarkan hasil proses pembahasan setiap tahapan tersebut, maka perencanaan pembangunan pada tahun 2019 terdiri dari 8 (enam) Program dan 28 (dua puluh delapan) Kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.097.545.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	255.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional	100.000.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	99.606.000
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000
	- Penyediaan alat tulis kantor	15.439.000
	- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	15.000.000



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	9.000.000
	- Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000
	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000
	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30.000.000
	- Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	370.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	10.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.955.000
	- Sosialisasi Kinerja Program SKPD	20.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4.955.000
5	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	400.000.000
	- Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	100.000.000
	- Pengukuran/ Pemetaan Ulang Lahan 2 Transmigrasi	300.000.000
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	350.000.000
	- Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	350.000.000
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	230.000.000
	- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	80.000.000
	- Pengembangan kelembagaan produktivitas & Pelatihan Kewirausahaan	100.000.000
	- Wirausaha Baru	50.000.000
8	Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	425.000.000
	- Pendataan, Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana HI	100.000.000
	- Penyuluhan & Penyelesaian Perselisihan HI	200.000.000
	- Kesejahteraan Pekerja	75.000.000
	- Penyusunan Database Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50.000.000
JUMLAH		2.617.500.000



Adapun Perjanjian Kerja Eselon II tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif dan efisien	Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	4 Bidang dan Sekretariat
2.	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung Kantor
3.	Terwujudnya ASN yang berkompeten	Optimalisasi Kompetensi SDM yang memenuhi Standar	100 %
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program, peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Disnakertrans - Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran dan akuntabilitas kinerja - Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
5.	Tersedianya Data Supras Sosial dan Ekonomi	Jumlah UPT yang dibina dan dimonitor	5 Kecamatan
6.	Tersedianya Tenaga terampil berbasis kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja : a. Mekanik Otomotif b. Mekanik Sepeda Motor c. Tehnisi AC	<p>20 Orang</p> <p>10 Orang</p> <p>10 Orang</p>
7.	Terwujudnya tingkat penyerapan lowongan kerja pada perusahaan sehingga berkurangnya pengangguran yang terdaftar dan terciptanya Pelaku Usaha Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari Kerja dan Perusahaan dalam wilayah Kabupaten Berau - Masyarakat Kab. Berau & pelaku Usaha Mandiri 	<p>Perusahaan di 13 Kecamatan</p> <p>30 orang</p>
8.	Terwujudnya ketenangan kerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan b. Jumlah perusahaan yang melaksanakan memiliki peraturan pemerintah c. Jumlah perusahaan yang melaksanakan PKB, PP d. Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan e. Lembaga Kerjasama Bipartit f. Upah Minimal sama dengan UMK 	<p>Perusahaan di 13 Kecamatan</p> <p>50 Perusahaan</p> <p>50 Perusahaan</p> <p>50 Perusahaan</p> <p>50 Perusahaan</p> <p>50 Perusahaan</p>



*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau*



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Sumber pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau, sebesar RP. 2.628.862.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Evaluasi kinerja dimulai dengan Rencana Kerja Tahunan yang mencakup Perjanjian Kinerja SKPD dan Penetapan Capaian Kinerja SKPD dengan melampirkan Perjanjian Kinerja SKPD yang selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang.

Pencapaian Kinerja SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang merupakan realisasi anggaran dan persentasi capaian Tahun 2018. dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.415.907.000	1.353.249.669	95.57
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	3.417.500	97.64
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	217.339.000	186.956.863	86.02
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas-operasional	124.000.000	107.584.489	86.76
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	102.624.000	102.624.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000	11.975.300	99.79
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.000.000	12.415.000	95.50
	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	24.994.700	99.98
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.920.000	25.634.100	95.22
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	4.980.000	99.60
	Penyediaan Peralatan dan	105.220.000	100.890.000	95.88



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

		Perlengkapan kantor			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.690.000	15.690.000	100
		Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000	41.716.700	92.70
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	269.576.000	269.568.087	100
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	78.000.000	78.000.000	100
		Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	373.038.000	366.802.930	98.33
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000	14.572.800	97.15
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.572.800	97.15
3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.955.000	4.955.000	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4.955.000	4.955.000	100
4		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	388.000.000	368.995.875	95.10
		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	388.000.000	368.995.875	95.10
5		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	285.000.000	276.903.499	97.16
		Penyusun informasi bursa tenaga kerja	90.000.000	86.866.200	96.52
		Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	195.000.000	190.037.299	97.46
6		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	345.000.000	340.779.241	98.78
		Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	100.000.000	97.953.000	97.95
		Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	175.000.000	174.974.600	99.99
		Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	70.000.000	67.851.641	96.93
7		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	134.234.000	131.338.121	97.84
		Penyediaan dan Pengelolaam prasarana dan sarana social dan ekonomi di wilayah Transmigrasi	134.234.000	131.338.121	97.84
8		Program Transmigrasi Regional	40.766.000	39.797.000	97.62
		Penyuluhan Transmigrasi	40.766.000	39.797.000	97.62



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

	Regional		
Total		2.628.862.000	2.530.591.205
			96.26

Dan untuk Pencapaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang merupakan capaian Tahun 2018. dengan rincian sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Menyurat Kantor	Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko	Lembar	930	744	80%
2	Biaya komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100%
3	Kendaraan dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, Oli dan yang mendapat BBM	Unit	27	27	100%
4	Pengelola Keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang	Bulan	12	12	100%
5	Peralatan Kebersihan Kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan	Unit	2	2	100%
6	Perawatan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jenis/ Unit	63	60	95 %
7	Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	35	41	100%
8	Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang diadakan	jenis	55	51	92 %
9	Peralatan listrik dan elektronika kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	Paket	4	7	100%
10	Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	Jumlah Bacaan	Paket	49	39	79 %



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Berau

11	Makan minum aparaturnya dan tamu dinas	Jumlah makanan dan minuman	kotak	36	36	100%
12	Rapat dan konsultasi keluar daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang	100	74	74 %
13	Rapat dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau	Orang	100	62	62 %
14	Jasa Administrasi /Tekhnis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi /teknis perkantoran yang tersedia	Orang	12	12	100%
15	Terawatnya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di Rawat	Unit	2	2	100%
16	Laporan capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja keuangan	Laporan	1	1	100%
17	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3	3	100 %
18	Tersusunnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Kegiatan	Laporan	12	12	100 %
19	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	1	60 %
20	Terlaksananya Pendataan, Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Kegiatan	Perusahaan	50	50	100 %



21	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kegiatan	Perusahaan	50	50	100 %
22	Terjadinya Peningkatan fungsi-fungsi Lembaga ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	Jumlah Kegiatan	Perusahaan	50	50	100 %
Jumlah Rata Persentase Capaian OPD			94.97 %			

B. PENJELASAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Kinerja OPD dan realisasi anggaran serta presentasi pencapaian kinerja Tahun 2018 akan dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk membantu menangani masalah perkantoran serta melayani, mengarahkan dan mengatur semua kegiatan. Jumlah total dana Rp. 1.415.907.000,- dimana jumlah total realisasi sebesar Rp. 1.353.249.669,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 95.57 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional kantor agar kinerja aparatur dapat ditingkatkan. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan jumlah realisasinya sebesar Rp. 14.572.800,- yaitu 97.15 %.
3. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah dana yang dianggarkan Rp. 4.955.000 dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 4.955.000,- persentasenya sebesar Rp. 100%. Tujuan program ini adalah sebagai pendukung penyediaan laporan dan penyusunan dokumen keuangan.
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan program yang ditujukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan



ketrampilan bagi pencari kerja untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia agar memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Pada program ini jumlah dana yang dimiliki sebesar Rp. 388.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 368.995.875,- yaitu sebesar 95.10 %.

5. Program Peningkatan kesempatan kerja merupakan upaya peningkatan kesempatan kerja yang akan memberikan dampak positif serta menggambarkan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Jumlah dana sebesar Rp. 285.000.000,- terserap sebesar Rp. 276.903.499,- atau 97.16%.
6. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan yaitu program yang mencakup kegiatan pendataan penyuluhan, pembentukan pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan sarana hubungan industrial, penyuluhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja. Dana yang di anggarkan sebesar Rp. 345.000.000,- terserap sebesar Rp. 340.779.241,- yaitu 98.78%.
7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yaitu program yang mencakup penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana social dan ekonomi di wilayah transmigrasi. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 134.234.000,- dan telah terealisasi selama tahun 2018 sebesar Rp. 131.338.121,- yaitu 97.62 %
8. Program Transmigrasi Regional merupakan program dengan kegiatan penyuluhan bagi transmigran Regional. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 40.766.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.797.000,- yaitu 97.62 %.



REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DPA 2017 (Rp)		REALISASI 2017			PAGU DPA 2018 (Rp)		REALISASI 2018		
		AWAL	DPPA	KEUANGAN		FISIK (BOBOT TERTIMBANG)%	AWAL	DPPA	KEUANGAN		FISIK (BOBOT TERTIMBANG)%
				(Rp.)	%				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NON PROGRAM	4.304.050.000	4.607.650.000	4.219.154.979	91,57	59,89	4.427.950.000	4.643.450.000	4.230.921.604	91.12	58.18
B	Belanja Langsung	2.046.953.000	2.437.502.800	2.315.231.117	94,98	32,86	2.223.510.000	2.628.862.000	2.530.591.205	96.26	34.80
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	994.177.750	1.209.977.550	1.141.399.000	94,33	16,20	1.180.555.000	1.415.907.000	1.353.249.669	95.57	18.61
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	8.050.000	8.048.450	99,98	0,11	2.500.000	3.500.000	3.417.500	97.64	0.05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	169.000.000	230.065.800	219.689.300	95,49	3,12	225.339.000	217.339.000	186.956.863	86.02	2.57
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	107.500.000	133.020.000	95.265.700	71,62	1,35	100.000.000	124.000.000	107.584.489	86.76	1.48
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	107.288.000	109.988.000	109.104.000	99,20	1,55	97.178.000	102.624.000	102.624.000	100.00	1.41
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000	9.375.000	9.373.100	99,98	0,13	7.000.000	12.000.000	11.975.300	99.79	0.16
	Penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja	5.000.000	6.500.000	6.500.000	100	0,09	13.000.000	13.000.000	12.415.000	95.50	0.17
	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	22.000.000	22.000.000	100	0,31	20.000.000	25.000.000	24.994.700	99.98	0.34
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	27.300.000	15.319.200	56,,11	0,22	16.700.000	26.920.000	25.634.100	95.22	0.35



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	5.000.000	7.500.000	7.423.500	98,98	0,11	5.000.000	5.000.000	4.980.000	99,60	0.07
Bangunan kantor										
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan	5.000.000	7.592.000	7.547.000	99,41	0,11	9.350.000	15.690.000	15.690.000	100,00	0.22
Perundang-Undangan										
Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	17.000.000	16.781.200	98,71	0,24	35.000.000	45.000.000	41.716.700	92,70	0.57
Rapat-rapat	170.869.750	220.869.750	220.100.000	99,65	3,12	187.800.000	269.576.000	269.568.087	100,00	3.71
Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah										
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	30.000.000	30.000.000	29.970.000	99,90	0,43	60.000.000	78.000.000	78.000.000	100,00	1.07
Penyediaan Jasa Administrasi/Tehnis Perkantoran	349.520.000	380.717.000	374.277.550	98,31	5,31	362.688.000	373.038.000	366.802.930	98,33	5.04
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	39.000.000	105.220.000	100.890.000	95,88	1.39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.000.000	23.750.000	13.310.000	56,04	0,19	5.000.000	15.000.000	14.572.800	97,15	0.20
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.000.000	23.750.000	13.310.000	56,04	0,19	5.000.000	15.000.000	14.572.800	97,15	0.20
Program Peningkatan Pengemabnagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	17.998.750	47.998.750	46.748.750	97,40	0,66	4.955.000	4.955.000	4.955.000	100,00	0.07
Penyusunan Dokumen	17.998.750	47.998.750	46.748.750	97,40	0,66	4.955.000	4.955.000	4.955.000	100,00	0.07



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Sosialisasi Kinerja Program SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	205.827.500	255.827.500	252.501.000	98,70	3,58	363.000.000	388.000.000	368.995.875	95.10	5.07	
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	205.827.500	255.827.500	252.501.000	98,70	3,58	363.000.000	388.000.000	368.995.875	95.10	5.07	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	63.386.000	153.386.000	130.076.200	84,80	1,85	275.000.000	285.000.000	276.903.499	97.16	3.81	
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	63.386.000	103.386.000	98.626.200	95,40	1,40	80.000.000	90.000.000	86.866.200	96.52	1.19	
Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	-	50.000.000	31.450.000	62,29	0,45	195.000.000	195.000.000	190.037.299	97.46	2.61	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	746.563.000	746.563.000	731.196.167	97,94	10,23	245.000.000	345.000.000	340.779.241	98.78	4.69	
Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lemabaga Ketenagakerjaan dan sarana HI	287.106.000	287.106.000	276.327.100	96,25	3,92	75.000.000	100.000.000	97.953.000	97.95	1.35	
Penyuluhan dan Penyelesaian Persilihan	191.001.000	191.001.000	188.516.080	98,70	2,68	100.000.000	175.000.000	174.974.600	99.99	2.41	



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

Hubungan Industrial Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan Syarat-syarat kerja	286.456.000	286.456.000	266.352.987	99,22	3,78	70.000.000	70.000.000	67.851.641	96.93	0.93
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	-	-	-	-	-	109.234.000	134.234.000	131.338.121	97.84	1.81
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	-	109.234.000	134.234.000	131.338.121	97.84	1.81
Program Transmigrasi Regional	-	-	-	-	-	40.766.000	40.766.000	39.797.000	97.62	0.55
Penyuluhan Transmigrasi Regional	-	-	-	-	-	40.766.000	40.766.000	39.797.000	97.62	0.55
JUMLAH		6.351.003.000	7.045.152.800	6.534.386.096		6.651.460.000	7.272.312.000	6.761.512.809	92.98	92.98



C. Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2018 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, digunakan formula sebagaimana tabel di bawah. Sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2018. Data dan informasi selengkapnya sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Berau

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi 2018
			2018	2021		
1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap dan cakupan peserta pelatihan yang difasilitasi bimbingan lanjut (persen)	20	65	Disnakertrans	200%
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja lokal yang terserap di pasar kerja (persen)	35	70	Disnakertrans	22.9 %
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan (persen)	48	80	Disnakertrans	32,3%
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Besaran UMK (juta rupiah)	2.315.000	3.242.300	Disnakertrans	3.120.996,44



D. Realisasi Pelaksanaan RKP Tahun 2018

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib (Ketenagakerjaan) dan Pilihan (Ketransmigrasian) yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Program dan 6 Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	388.000.000	368.995.875	95.10
-	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	388.000.000	368.995.875	95.10
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	345.000.000	340.779.241	98.78
-	Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial	100.000.000	97.953.000	97.95
-	Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	175.000.000	174.974.600	99.99
-	Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	70.000.000	67.851.641	96.93
3	Program Perluasan Kesempatan Kerja	285.000.000	276.903.499	97.16
-	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	90.000.0000	86.866.200	96.52
-	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	195.000.000	190.037.299	97.46
Jumlah		1.018.000.000	986.678.615	97.01

Sumber : Subbag Sungram, Keuangan dan Aset Disnakertrans Kab. Berau



2. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 388.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 368.995.875,00 atau 95.10%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

Keluaran :

Presentase Tenaga Kerja yang terserap dan Cakupan Peserta Pelatihan yang difasilitasi bimbingan lanjut (persen) dengan target sebesar 20 Orang pada Tahun 2018.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah Terlatihnya para pencari kerja sebanyak 40 orang pada Tahun 2018 yang melebihi target sebesar 200 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor

NO	NAMA	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
01	Beni Batu Amba Tanah Toraja, 10-10-1996	SMA IPS	Kristen Protestan	Mangkajang Talisayan
02	Muhammad Ma'Wa Alfian Tanjung Redeb, 15-05-1985	SMK/ Akuntansi 2003	Islam	Jl. SM. Aminuddin, Gg. Borobudur RT.18, Tanjung Redeb
03	Joneslin Manulu Samperaja, 28-11-1996	SMK 2014	Kristen Protestan	Jl. Gunung Panjang RT 04, Tanjung Redeb
04	Mursid Amin Tanjng Redeb, 06-02-1994	MAN(IPS)/2012	Islam	Jl. Raja Alam RT.02, Sambaliung
05	Mujiono Gebang Prasetyo Rembang, 25-01-1997	SMP 2012	Islam	Jl. Sukan Tengah SP.4 RT. 12, Sambaliung
06	Rizki Hidayat Ramadhani Berau, 24-12-2000	SMA (IPS)/ 2018	Islam	Jl. Dara Mahkota RT.00 Labanan Jaya, Teluk Bayur
07	Yoga Rello Ngabekti Tarakan, 21-03-1999	SMA (IPA)/ 2017	Islam	Jl. P. Semama Gg. Asmara Kodim, Tanjung Redeb



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

08	Farhan Yustisio Berau, 03-Juni-2000	SMA/ IPS/ 2018	Islam	Jl. pemuda Gg.Pandan Wangi RT. 14 No. 37
09	Fadli Julia Hermawan Berau, 18 Juli 2000	SMA/ IPA (2018)	Islam	Jl. Durian III Gg. Ayam, Tanjung Redeb
10	Ikgang Fauzi Berau, 02 Desember 1996	SMK / NAUTIKA Kpl Penangkap Ikan/ 2015	Islam	Jl. Durian III RT. 40

b. Peserta Pelatihan Tehnisi AC

NO	NAMA	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
01	Muhammad Jaini Masransyah 23 April 2000	SMK	Islam	Jl. Gatot Subroto Gg Jambu 2 Rt 02
02	Mardu Ulusalu, 03 Maret 1994	SMA (IPA)/ 2012	Kristen Protestan	Jl. Dahlia No.13, Kelurahan Gayam, Tanjng Redeb
03	Deddy Setiawan Azhar Amuntasi, 15 Januari 1994	SMA/ IPS (2012)	Islam	Jl. Dermaga Perum Korporasi RT. 002, Tanjung Redeb
04	Agus Haryanto Berau, 27 Agustus 1998	SMK/Agribisnis Prod. Tanaman 2012	Islam	Jl. Manunggal RT.09, Kelurahan Gayam
05	Rahmani Sungai Danau, 13 Maret 1994	SMK, Tek. Kendaraan Ringan (2018)	Islam	Tanjung Perangat, RT.1, Sambaliung
06	Abdurrahim Natih, 6 Agustus 1999	SMK	Islam	Jl. Bayanudin, Rt.14, Sambaliung
07	Muhajirin Tanjung Redeb, 11 November 1993	Paket C (IPS)/ 2012	Islam	Jl. Karang Mulyo, RT.14 Karang Ambon
08	Rahmat Hidayatullah Tanjung Redeb, 24 April 1994	S1/ B.Ingggris 2017	Islam	Jl. Padat Karya Rt.09, Sambaliung
09	Muhammad Andri Hermawan Samarinda, 12 Juni 1991	SD	Islam	Jl. Pulau Sambit
10	Ade Bagus Budi Prasetyo Banyuwangi, 03-10-1996	SMA	Islam	Jl. DR Murjani 1 Karang Ambon

c. Peserta Pelatihan Mekanik Otomotif

NO	NAMA	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
01	Muhammad Ardhan Riyanata Tanjung Redeb,22-03-1994	SMK	Islam	Jl. Gatot Subroto Gg Jambu 2 Rt 02
02	Rohmad Palembang, 24-12-1998	SMA (IPA)/ 2012	Kristen Protestan	Jl. Dahlia No.13, Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau

03	Jeklif Parenkuan Gentuma, 09-01-1999	SMA/ IPS (2012)	Islam	Jl. Dermaga Perum Kor RT. 002, Tanjung Rede
04	Muhammad Samsudin Maulana Berau, 29-09-1995	SMK/Agribisnis Pro Tanaman 2017	Islam	Jl. Manunggal RT.09, K Gayam
05	Eri Evendi Tanjung Redeb. 02-01-1994	SMK, Tek Kendara Ringan (2018)	Islam	Tanjung Perangat, RT.1 Sambaliung
06	Egi Sukma Anshari Berau, 16-09-1996	SMK	Islam	Jl. Bayanudin, Rt.14, Sambaliung
07	Asep Ridwan Purnama Berau, 04-09-1999	Paket C (IPS)/ 2016	Islam	Jl. Karang Mulyo, RT.14 Karang Ambon
08	Tomi Saputra Tumbit, 06-07-1996	S1/ B.Ingggris 2017	Islam	Jl. Padat Karya Rt.09, Sambaliung
09	Julkifli Azis Kutai, 01-07-194	SD	Islam	Jl. Pulau Sambit
10	Sulton Nawawi Berau, 25-05-1998	SMA	Islam	Jl. DR Murjani 1 Karang Ambon
11	Andi Suseno Samarinda, 27-05-1998	SMK Bangunan 20	Islam	Jl Anggrek RT 01 No 05
12	Yasir Enrekang, 23-09-1994	SMA IPA	Islam	Jl Porosbulungan Maluang
13	Akmal Sakaria Palnro, 07-07-1994	SMK Otomotive	Islam	Jl. M. Iswahyudi RT 03 Rinding
14	Sofyan Karana, 25-12-1994	D2 Informatika IPS 2010	Islam	Jl Gunung Panjang
15	Sahrul Ujung Pandang, 27-03-1996	SMA IPS 2016	Islam	Jl Mangga III RT 03
16	Moberli Berau, 10-07-1999	SMA IPA 2017	Kristen Protestan	Merasa Kelay
17	Muhammad Juheri Sya'ab TG Berau, 26-11-1999	SMA IPS 2017	Islam	Jl. Cemara RT 09 Rindi
18	Abdul Rahmad Bulu Kumba, 26-2-1987	SMK Otomotive	Islam	Jl. H Isa Gg Mardatilah
19	Muhammad Jamaluddin Trenggalek, 07-06-1992	MAN 2011	Islam	Jl. Pemuda Gg Pinang Merah
20	Carles Wirdan Talion, 08-12-1997	SMK Otomotive, 2017	Islam	Rantau Panjang



b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja sebesar Rp. 345.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 340.779.241,00 atau 98,78%, adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan adalah :

1. Pendataan Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Hubungan Industrial

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 97.95% dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 97.953.000,-.

Hasil :

Terlaksananya kegiatan Pendataan dan Penyuluhan serta pembinaan ketenagakerjaan dengan maksimal.

2. Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Keluaran :

Lebih banyak perselisihan Industrial yang terselesaikan dengan baik. Yaitu dengan dana yang telah dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,- terealisasi 174.974.600,- yaitu 99.99 %.

Hasil :

Terselesaikannya Perjanjian bersama sebesar 90 Kasus, Anjuran sebesar 4 kasus, 12 kasus dalam proses dan jumlah pekerja atau kasus karyawan sebesar 1487 orang.

3. Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dan Syarat Kerja

Keluaran :

Jumlah besaran UMK sebesar Rp. 3.120.996.44,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Empat Puluh Empat Rupiah)

Hasil :

Tercapainya besaran UMK yang melebihi Target yang sudah ditentukan.



c. Program Perluasan Kesempatan Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja sebesar Rp. 285.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 276.903.499,00 atau 97.16%, adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Keluaran :

Tersusunnya buku IPK (Informasi Pasar Kerja) yang didalamnya mencakup rincian bursa tenaga kerja, dari pencari kerja terdaftar, pencari kerja yang ditempatkan, dan lowongan pekerjaan.

Hasil :

Terlaksananya kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Kerja dengan maksimal.

2. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Keluaran :

Dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 195.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 190.037.299,- yaitu 97.46 % maka kegiatan pelatihan kewirausahaan dapat terlaksana dengan baik.

Hasil :

Banyaknya masyarakat yang terbantu dengan adanya kegiatan ini. Karena target dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga yang tidak bekerja secara Formal memperoleh keterampilan yang dapat menghasilkan suatu usaha mandiri.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini terlihat dari realisasi fisik keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 97,01%. Meskipun ada beberapa permasalahan yang



dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada serta lokasi yang jauh antara satu tempat ketempat yang lain.

2. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dapat dijabarkan solusinya sebagai berikut :

- a. Perlu ada penambahan komputer minimal 4 unit lagi.
- b. Perlu ada penambahan sarana operasional mobil dan motor.
- c. Perlu adanya penambahan benvit yang memadai untuk menunjang kelancaran pelayanan.
- d. Perlu adanya Tenaga Pelatih agar kegiatan Pelatihan dapat lebih maksimal.
- e. Perlu adanya BLK atau Balai Latihan Kerja sendiri
- f. Perlu adanya Tambahan Mediator agar penyelesaian masalah Hubungan Industrial dapat terselesaikan lebih cepat. Penambahan tenaga SDM untuk PNS dan Non PNS
- g. Perlu adanya penambahan anggaran setiap tahunnya.
- h. Perlu adanya pengadaan Mobil Inovasi Pelayanan .

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s/d Tahun 2018

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	
			2017	2018
I	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	130%	200%



II	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	32.3%	22.9%
III	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	80%	80%
IV	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja / Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif . (Menurut UU RI tahun 2011 masalah yang berkaitan dengan BPJS antara lain :	100 %	100 %
		- BPJS berwenang menagih pembayaran iuran - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam kewajibanya)	100 % - -	100 % - -

REALISASI ANGGARAN

1. Pelatihan kerja :

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja dengan jumlah Rp 363.000.000 dan dengan adanya APBD – P menjadi Rp 388.000.000,- oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Drs. Fauzi Aspul.

2. Penempatan Tenaga Kerja :

Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan penyusunan informasi tenaga kerja dengan jumlah anggaran Rp 80.000.000,- mendapat penambahan sebesar Rp. 10.000.000,- APBD –P menjadi Rp 90.000.000,- oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Juli Mahendara, SH.

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Pendataan , penyuluhan, pembentukan , pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan sarana hubungan HI sebesar Rp 245.000.000,- dan dengan adanya APBD – D menjadi Rp 345.000.000,-



oleh PPTK, Susanto Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyuluhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar Rp. 75.000.000,- dan dengan adanya APBD – P menjadi Rp 100.000.000,- oleh PPTK, Sony Perianda,SH

Dukungan Personil

1. Pelatihan kerja :

Jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian pelayanan pelatihan kerja terutama dalam pelaksanaan pelatihan kepanitiaan sebanyak 7 orang terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang PTT

2. Penempatan Tenaga Kerja :

Jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam pencapaian pelayanan penempatan tenaga kerja masih belum ada

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

Jumlah personil yang terlibat dalam Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Pendataan , penyuluhan, pembentukan , pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan sarana hubungan HI sebanyak 3 orang PNS dan

Jumlah personil yang terlibat dalam Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyuluhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 3 orang PNS

4. Kepesertaan Jamsostek

Jumlah personil yang terlibat dalam pelayanan kepesertaan Jamsostek tidak ada

Permasalahan dan solusi

1. Pelatihan kerja :

a. Uraian Masalah

Dengan Anggaran yang ada, untuk pelayanan pelatihan kerja tidak dapat maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga hanya dapat mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan berbasis kompetensi, sedangkan untuk pelatihan kewirausahaan tidak dijalankan.



Masih banyak pencari kerja belum/tidak memiliki keterampilan . Dalam melaksanakan pelatihan dalam rangka program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja khususnya pelatihan berbasis kompetensi maka kerjasama dengan balai latihan kerja dengan mengirim peserta pelatihan ke BLK Samarinda/Balikpapan, sedangkan untuk pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan mendatangkan instruktur. Target atau jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan anggaran

b. Upaya tindak lanjut

Membuat program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/ masyarakat.

2. Penempatan Tenaga Kerja :

a. Uraian Masalah

Sampai saat ini Disnakertrans Kab. Berau belum memiliki pengantar kerja dan petugas antar kerja serta perusahaan belum melaporkan jumlah karyawan yang diterima di perusahaan masing-masing

b. Upaya Tindak lanjut

Mengadakan tenaga klinis pengantar kerja dan petugas antar kerja dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Akan menghubungi perusahaan agar dapat menyampaika laporan tentang tenaga kerja yang ditempatkan serta mengusulkan jumlah anggaran kegiatan.

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

a. Uraian Masalah

Berdasarkan peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014, tugas Mediator Hubungan Industrial yaitu 1) Pembinaan Hubungan Industrial; 2) Pengembangan Hubungan Industrial; 3) Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan. Mengingat pentingnya peran mediator dalam pembangunan ketenagakerjaan serta dalam upaya mendorong pelaksanaan otonomi daerah kedepan, perlunya pemerintah Kabupaten Berau memberikan dukungan terutama penambahan anggaran bidang hubungan industrial dan mediator. Dalam



melaksanakan pembinaan, pencegahan, penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimana hal ini menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dipandang akan lebih efisien, efektif dan tepat sesuai amanat Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Nomor 2 tahun 2004, serta menjalankan peraturan bupati Berau Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi

Tidak adanya anggaran dalam APBD mengenai tunjangan jabatan mediator yang telah diterbitkan Surat Keputusan dari menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya diantaranya memediasi perselisihan mengenai ketenagakerjaan tidak sebanding dengan beban resiko pekerja dan fungsinya sehingga diperlukan realisasi dan penegasan pemerintah Kabupaten Berau terhadap perlunya diberikan tunjangan jabatan mediator dan pengalokasian penganggaran APBD terhadap kegiatan mediator dalam menangani kasus perselisihan di 13 kecamatan yang sebelumnya tidak pernah ada

b. Upaya Tindak lanjut

Di Kabupaten Berau hanya ada 1 orang mediator hubungan industrial yang menangani sekitar 400 perusahaan, yang juga merangkap jabatan sebagai pegawai struktural sehingga untuk mengisi kekurangan mediator perlu melakukan penambahan personil mediator dan diberi tunjangan untuk jabatan tersebut serta diberi alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan beban pekerjaan.

c. Usulan tindak lanjut

Dengan karakteristik Kabupaten Berau yaitu lokasi perusahaan jauh dari Ibu kota Kabupaten di 13 Kecamatan sehingga Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan penyelesaian kasus perselisihan yang dilakukan perlu Dana Dekonsentrasi

Diperlukan dukungan dana terhadap pertemuan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial se Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang membahas berbagai kasus-kasus krusial termasuk



kasus yang masuk di Pengadilan Hubungan industrial pada pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 3 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	1
2	Berhasil	1
3	Cukup Berhasil	2
4	Kurang Berhasil	-
	Jumlah	4

Adapun tindak lanjut untuk Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi antara lain :

Membuat program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/ masyarakat, mengadakan tenaga klinis pengantar kerja dan petugas antar kerja dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Akan menghubungi perusahaan agar dapat menyampaikan laporan tentang tenaga kerja yang ditempatkan serta mengusulkan jumlah anggaran kegiatan.

Di Kabupaten Berau hanya ada 1 orang mediator hubungan industrial yang menangani sekitar 400 perusahaan, yang juga merangkap jabatan sebagai pegawai srtuktural sehingga untuk mengisi kekurangan mediator perlu melakukan penambahan personil mediator dan diberi tunjangan untuk jabatan tersebut serta diberi alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan beban pekerjaan.

Untuk Tahun 2019 diusulkan rencana kerja anggaran untuk kegiatan terkait jaminan sosial tenaga kerja.



Kesimpulan

Penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari Kondisi sebagai berikut :

1. Beberapa Indikator baik input, proses,output maupun benefit masih belum mempunyai Standar Baku. Untuk selanjutnya standar ini perlu disempurnakan untuk setiap tahunnya oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau, kemudian disosialisasikan ke SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk mengikutinya :
2. Belum ada Benchhmarking yang jelas untuk kegiatan – kegiatan yang bisa di bandingkan dengan Instansi sejenis di Pemerintah Kabupaten Berau. Hal ini akan terbaiki di masa-masa yang akan datang dengan cara study banding dengan instansi Pemerintah lain yang sejenis, sehingga menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan;
3. Beberapa Elemen Indikator masih dalam bentuk Prosentase dan 1 (satu) tahun, sehingga belum begitu akurat hasil pengukurannya. Untuk Tahun depan direncanakan menggunakan perhitungan-perhitungan dengan cara perhitungan tersebut diperoleh dari Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau yang disosialisasikan dengan SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;



4. Beberapa Elemen Indikator Input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membacanya. Untuk yang akan datang hal ini hendaknya dijadikan perhatian;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu Pelaksanaan CLEAN GOVERNMENT dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNMENT, sehingga kedepan akan terwujud sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau Akuntabel secara transparansi, kemudian menjadi umpan balik begi Stake Holder.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang-bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Penyusunan Program, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau ini dapat disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Tanjung Redeb, 4 Maret 2019
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kasubbag Penyus Program	

Apridoh Piarso, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630402 199203 1 010